

**NILAI-NILAI EKONOMI KEWARGANEGARAAN MELALUI  
EDUPRENEURSHIP SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN  
KESEJAHTERAAN GURU DI INDONESIA  
SUATU KAJIAN TENTANG PELUANG, TANTANGAN, DAN  
IMPLEMENTASINYA**

Tri Sutantina<sup>1</sup>

Universitas Sebelas Maret

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

[trisutantina2024@gmail.com](mailto:trisutantina2024@gmail.com)

Deni Zein Tarsidi<sup>2</sup>

Universitas Sebelas Maret

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

[denizein@staff.uns.ac.id](mailto:denizein@staff.uns.ac.id)

Joko Daryanto

Universitas Sebelas Maret<sup>3</sup>

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah

[jokodaryanto@staff.uns.ac.id](mailto:jokodaryanto@staff.uns.ac.id)

**ABSTRACT**

*This research aims to examine the economic values of citizenship through an edupreneurship approach as a strategy to improve the welfare of teachers in Indonesia. Teacher welfare is a fundamental issue in educational development, as mandated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which states that the economy shall be organized as a joint effort based on the principle of kinship for the greatest prosperity of the people. This is in line with Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, which emphasize the strategic role of teachers in improving the quality of education and welfare. Edupreneurship as a form of educational innovation is seen as capable of providing new opportunities for teachers to develop entrepreneurial skills based on knowledge, creativity, and civic values oriented towards economic independence. This study uses a qualitative approach with a literature review through the analysis of various references, including scientific articles and relevant previous research reports. The results of the study show that there are three important aspects in the implementation of edupreneurship, namely: (1) opportunities, in the form of opening up space for teachers to integrate entrepreneurship into educational practices; (2) challenges, which include limited skills, policy support, and access to resources; and (3) implementation, through curriculum integration, training, and the development of collaborative networks. Thus,*

*edupreneurship not only strengthens the economic value of citizenship, but also has the potential to improve the welfare of teachers in a sustainable manner.*

**Keywords:** *economic citizenship, edupreneurship, teacher welfare, literature review*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan melalui pendekatan *edupreneurship* sebagai strategi dalam meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia. Kesejahteraan guru merupakan isu fundamental dalam pembangunan pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan peran strategis guru dalam peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan. *Edupreneurship* sebagai bentuk inovasi pendidikan dipandang mampu memberikan peluang baru bagi guru untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan berbasis pengetahuan, kreativitas, dan nilai-nilai kewarganegaraan yang berorientasi pada kemandirian ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*literature review*) melalui analisis berbagai referensi, baik artikel ilmiah, maupun laporan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat tiga aspek penting dalam implementasi *edupreneurship*, yaitu: (1) peluang, berupa terbukanya ruang bagi guru untuk mengintegrasikan kewirausahaan dalam praktik pendidikan; (2) tantangan, yang meliputi keterbatasan keterampilan, dukungan kebijakan, dan akses terhadap sumber daya; serta (3) implementasi, melalui integrasi kurikulum, pelatihan, dan pengembangan jejaring kolaboratif. Dengan demikian, *edupreneurship* tidak hanya memperkuat nilai ekonomi kewarganegaraan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan guru secara berkelanjutan.

**Kata Kunci :** ekonomi kewarganegaraan, *edupreneurship*, kesejahteraan guru, literatur review

## **A. Pendahuluan**

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan sarana prasarana, tetapi terutama oleh kualitas guru sebagai ujung tombak pelaksana pendidikan. Guru berperan tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menentukan arah pembangunan manusia Indonesia(Mukhammad Kholid Mawardi, Qadir Muslim and Setyono, 2025). Oleh karena itu, kesejahteraan guru menjadi isu fundamental yang tidak bisa diabaikan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan nasional.

Kesejahteraan guru di Indonesia hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan(Wibowo, 2021). Banyak guru, khususnya di daerah, yang belum memperoleh penghasilan layak, meskipun mereka memiliki beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Data dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan kesejahteraan guru masih cukup besar, terutama antara guru berstatus

pegawai negeri sipil (PNS) dan guru honorer. Kondisi ini berdampak pada motivasi kerja, profesionalisme, serta kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan memengaruhi hasil belajar siswa.

Secara yuridis, kesejahteraan guru telah dijamin dalam berbagai regulasi. UUD 1945 Pasal 33 menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban mensejahterakan semua warga negara, termasuk guru sebagai profesi strategis dalam pembangunan bangsa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945) mengamanatkan bahwa guru berhak memperoleh penghasilan dan jaminan sosial yang memadai sesuai martabat profesi nya.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa pemenuhan kesejahteraan guru belum berjalan optimal. Banyak guru masih bergantung pada penghasilan dari pemerintah tanpa memiliki sumber pendapatan alternatif(Suyanto, 2021). Kondisi ini menimbulkan kerentanan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan atau keterbatasan anggaran negara. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif yang mampu mendorong kemandirian ekonomi guru sekaligus tetap selaras dengan nilai-nilai kewarganegaraan dan pembangunan pendidikan nasional.

Salah satu strategi yang dapat dikembangkan adalah melalui *edupreneurship*. Konsep *edupreneurship* merupakan perpaduan antara pendidikan dan kewirausahaan yang menekankan pada kemampuan guru untuk mengembangkan potensi kewirausahaan berbasis pengetahuan, kreativitas, dan nilai-nilai kewarganegaraan(Rahmah, 2022). Dengan *edupreneurship*, guru tidak hanya berperan sebagai tenaga pendidik, tetapi juga sebagai inovator

dan pencipta nilai ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

*Edupreneurship* juga selaras dengan nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan(Farida, 2021). Nilai-nilai tersebut mencakup prinsip kemandirian, tanggung jawab, kerja sama, kreativitas, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dengan menanamkan nilai ekonomi kewarganegaraan dalam kegiatan *edupreneurship*, guru dapat menjalankan peran ganda yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus membangun kemandirian ekonomi(Nurhadi, 2021). Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri.

Dalam praktiknya, *edupreneurship* membuka banyak peluang bagi guru. Guru dapat mengembangkan produk atau jasa berbasis pendidikan, misalnya media pembelajaran inovatif, bimbingan belajar, pelatihan, karya tulis, atau aplikasi digital untuk pendidikan(Rahmah, 2022). Peluang

ini tidak hanya memberi nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga memperluas jangkauan peran guru dalam masyarakat. Dengan demikian, guru tidak semata menjadi pengajar di ruang kelas, melainkan juga pelaku ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas.

Meski demikian, implementasi *edupreneurship* tidak terlepas dari tantangan. Beberapa kendala utama yang dihadapi antara lain keterbatasan keterampilan kewirausahaan guru, minimnya dukungan kebijakan dari pemerintah, keterbatasan akses modal dan teknologi, serta kurangnya jejaring kolaborasi (Wibowo, 2021)f. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui program penguatan kapasitas, pelatihan kewirausahaan, serta kebijakan yang mendukung pengembangan *edupreneurship* di lingkungan pendidikan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengembangan *edupreneurship* mampu meningkatkan kemandirian ekonomi guru sekaligus memperkaya praktik pendidikan. Namun, sebagian besar

penelitian masih terfokus pada aspek teknis, sementara kajian tentang integrasi nilai ekonomi kewarganegaraan dalam *edupreneurship* masih terbatas. Padahal, nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan merupakan dasar penting agar *edupreneurship* tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penguatan karakter kebangsaan dan kesejahteraan kolektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan melalui *edupreneurship* sebagai strategi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *literatur review*, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai peluang, tantangan, serta implementasi *edupreneurship* dalam konteks pendidikan nasional. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus masukan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan guru dalam

mengembangkan strategi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis literature review atau kajian pustaka. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan untuk menguji hipotesis empiris, melainkan untuk menelaah, mensintesis, dan menginterpretasi berbagai sumber literatur yang relevan terkait dengan nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan melalui *edupreneurship* sebagai strategi peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia. Kajian literatur ini difokuskan pada penggalian makna, hubungan konsep, serta pemetaan peluang dan tantangan implementasi *edupreneurship* dalam konteks pendidikan nasional.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Hasil**

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa *edupreneurship* memiliki posisi strategis dalam membangun kemandirian dan kesejahteraan guru di Indonesia. *Edupreneurship* dipahami sebagai

integrasi antara aktivitas pendidikan dan kewirausahaan yang berorientasi pada nilai-nilai sosial, etika, dan keadilan ekonomi. Dalam konteks guru, konsep ini memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi kreativitas, kompetensi pedagogik, dan jejaring sosial guna menghasilkan nilai ekonomi yang tetap berlandaskan moralitas profesi pendidik. Kajian (Santoso, Yunianto 2024) menunjukkan bahwa praktik *edupreneurship* di lingkungan pendidikan dapat memperkuat karakter kewarganegaraan ekonomi guru, seperti kemandirian, tanggung jawab, dan solidaritas sosial.

Peluang utama pengembangan *edupreneurship* bagi guru terletak pada dukungan regulasi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pemerintah memiliki kewajiban meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru. Hal ini sejalan dengan semangat UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian nasional disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian, guru memiliki

peluang untuk mengembangkan bentuk-bentuk usaha berbasis pendidikan yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Kajian kebijakan pendidikan juga menegaskan bahwa program Merdeka Belajar memberikan ruang luas bagi kreativitas dan inovasi ekonomi dalam dunia pendidikan, termasuk bagi guru untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang produktif secara ekonomi (Kemendikbudristek, 2023).

Peluang lain yang diidentifikasi dalam hasil literatur adalah berkembangnya teknologi digital yang membuka akses luas bagi guru untuk mengembangkan usaha berbasis pengetahuan (*knowledge-based entrepreneurship*). Platform digital seperti marketplace edukatif, kursus daring, dan aplikasi pembelajaran telah menjadi medium baru bagi guru untuk memasarkan produk ajar, buku digital, hingga jasa konsultasi Pendidikan(Purwanto, Pratikto2024). Melalui digitalisasi, guru dapat menyalurkan kompetensi pedagogisnya menjadi aktivitas ekonomi produktif tanpa

meninggalkan esensi pendidikannya. Dengan kemampuan digital yang baik, guru mampu menjadi *edupreneur digital* yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap literasi dan pendidikan masyarakat luas.

Selain dukungan regulatif dan digitalisasi, hasil kajian juga mengungkap peluang sosial-kultural yang kuat. Budaya gotong royong, etos kerja kolektif, dan nilai kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia merupakan modal sosial penting untuk mengembangkan edupreneurship berbasis nilai kewarganegaraan. Model kolaboratif seperti *school-community partnership* dan *school-based enterprise* dapat menjadi sarana efektif bagi guru dalam menggerakkan kegiatan ekonomi bersama dengan siswa dan masyarakat(Kurniawati *et al.*, 2024). Beberapa penelitian kasus menunjukkan bahwa praktik ini telah berhasil di beberapa sekolah di Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, di mana guru berperan sebagai pembimbing usaha kecil berbasis

pendidikan yang melatih siswa sekaligus menghasilkan pendapatan tambahan(AFA, Badriyah 2025)

Namun, hasil analisis juga menunjukkan berbagai tantangan serius dalam mengimplementasikan edupreneurship di lingkungan pendidikan. Tantangan utama berasal dari rendahnya literasi ekonomi dan manajerial di kalangan guru. Sebagian besar guru belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan usaha, perencanaan keuangan, dan pemasaran produk berbasis pendidikan (Fitri, 2024). Hal ini menyebabkan banyak inisiatif edupreneurial yang tidak berkelanjutan karena lemahnya kemampuan perencanaan dan evaluasi usaha.

Tantangan lainnya bersumber dari keterbatasan kelembagaan. Sistem birokrasi pendidikan masih cenderung administratif dan kurang fleksibel dalam memberi ruang bagi kegiatan kewirausahaan. Dalam banyak kasus, guru yang ingin mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis sekolah justru menghadapi kendala regulasi dan kekakuan

struktur organisasi sekolah(Kusumawati *et al.*, 2025). Hambatan ini diperparah oleh minimnya dukungan kebijakan daerah terhadap inovasi ekonomi pendidikan. Hasil literatur juga menunjukkan adanya ketimpangan antara sekolah perkotaan dan pedesaan dalam akses modal, teknologi, dan pelatihan kewirausahaan(Lestariningsih, Mau 2025)

Dari sisi sosial, persepsi masyarakat dan guru sendiri menjadi tantangan tersendiri. Profesi guru sering kali masih dipandang sebagai profesi pengabdian yang tidak layak bersentuhan dengan dunia ekonomi(Mugiarto, 2023). Pandangan ini, meskipun berakar pada nilai moral luhur, sering kali menjadi penghambat berkembangnya semangat kewirausahaan di kalangan guru. Di sisi lain, masih banyak sekolah yang belum memiliki kebijakan internal yang mendukung kegiatan wirausaha guru, misalnya dalam bentuk unit usaha sekolah atau pelatihan rutin.

Dalam hal implementasi, hasil kajian memperlihatkan adanya berbagai bentuk penerapan

*edupreneurship* yang telah berjalan di Indonesia maupun di negara lain. Di Indonesia, beberapa sekolah menerapkan model *school-based enterprise* di mana guru dan siswa bersama-sama mengelola unit usaha, seperti kantin, toko alat tulis, atau produksi bahan ajar digital(Mugiarto, 2023). Model ini selain memberikan pengalaman belajar kontekstual kepada siswa juga meningkatkan kesejahteraan guru melalui hasil usaha. Implementasi lainnya berupa *community-based edupreneurship*, yaitu kemitraan antara guru, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pendidikan, seperti pelatihan literasi digital atau pengelolaan lembaga kursus.

Beberapa literatur internasional juga menyoroti praktik baik dari negara seperti Finlandia dan Korea Selatan yang telah mengintegrasikan *edupreneurship* dalam kebijakan pendidikan guru. Guru didorong untuk menjadi inovator pendidikan sekaligus pelaku ekonomi kreatif melalui dukungan inkubasi bisnis pendidikan dan dana penelitian terapan. Model

seperti ini dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis nilai-nilai kewarganegaraan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dari keseluruhan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat tantangan signifikan dalam penerapan *edupreneurship* di kalangan guru, potensi pengembangannya sangat besar. *Edupreneurship* dapat menjadi jembatan antara nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan dan peningkatan kesejahteraan guru, asalkan didukung oleh kebijakan yang adaptif, peningkatan kompetensi ekonomi, dan budaya inovasi yang kuat di lingkungan pendidikan(Robbani, 2024).

## **2. Pembahasan**

Temuan hasil kajian menunjukkan bahwa *edupreneurship* merupakan konsep yang relevan dan kontekstual dengan kebutuhan guru di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi dan profesionalisme di era global. Berdasarkan teori keadilan distributif John Rawls (1971), kesejahteraan

tidak hanya diukur dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari keadilan akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Dalam konteks ini, *edupreneurship* memberikan jalan bagi guru untuk memperoleh keadilan ekonomi melalui aktivitas kreatif dan produktif tanpa meninggalkan fungsi sosialnya sebagai pendidik(Afifandasari and Subiyantoro, 2022).

Peluang besar pengembangan *edupreneurship* di Indonesia dapat dilihat dari sinergi antara kebijakan pendidikan dan ekonomi nasional. Program Merdeka Belajar, revitalisasi SMK, dan kebijakan peningkatan kompetensi guru menjadi instrumen strategis yang dapat memperkuat kapasitas guru sebagai pelaku wirausaha pendidikan(Sembiring, 2025). Guru dapat memanfaatkan kebijakan ini untuk mengembangkan model pembelajaran produktif, mengelola usaha berbasis sekolah, dan menciptakan sumber pendapatan baru. *Edupreneurship*, dalam hal ini, menjadi sarana konkret bagi guru untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan seperti

tanggung jawab, kemandirian, dan partisipasi sosial (Mawardi *et al.*, 2025)

Dalam tataran sosial, peluang *edupreneurship* juga muncul melalui sinergi antara sekolah dan masyarakat. Sekolah dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi kreatif berbasis pengetahuan yang digerakkan oleh guru dan peserta didik(Kasidi, 2023). Hal ini sejalan dengan konsep *education for sustainability*, di mana kegiatan pendidikan harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus sosial. Kolaborasi multipihak antara sekolah, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem *edupreneurship* yang berkelanjutan(Yosepty *et al.*, 2025)

Meski demikian, pembahasan literatur menunjukkan bahwa tantangan struktural dan kultural masih cukup kuat. Tantangan utama adalah kesenjangan kapasitas guru dalam aspek kewirausahaan. Sebagian besar guru masih berorientasi pada paradigma pedagogis konvensional yang menempatkan kegiatan ekonomi di

luar ranah profesinya(Anjelina and Azzahra, 2025). Selain itu, sistem pendidikan yang terlalu birokratis menyebabkan inisiatif ekonomi guru sering kali terhambat. Dalam hal ini, perlu adanya reformasi kelembagaan yang memberikan ruang bagi kreativitas dan fleksibilitas guru untuk berinovasi dalam konteks kewirausahaan pendidikan.

Tantangan lain bersifat sosial-budaya, yaitu anggapan bahwa guru yang berwirausaha akan mengabaikan tugas profesionalnya(Arma and Iswatiningsih, 2025). Padahal, dalam paradigma pendidikan modern, guru justru dituntut menjadi agen perubahan dan penggerak ekonomi masyarakat melalui kegiatan produktif yang bernilai pendidikan. Maka, perubahan mindset menjadi kunci penting dalam membangun kesadaran baru bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar hak individu, melainkan bagian dari tanggung jawab sosial untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Dari sisi implementasi, pembahasan menunjukkan bahwa

keberhasilan *edupreneurship* sangat bergantung pada integrasi nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan ke dalam setiap kegiatan ekonomi guru. Nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kerja keras, dan kepedulian sosial harus menjadi pedoman utama agar praktik *edupreneurship* tidak terjebak pada komersialisasi pendidikan. Dengan menanamkan nilai-nilai ini, guru dapat berperan sebagai *role model* kewirausahaan etis bagi peserta didik dan masyarakat.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya dukungan kebijakan dan pelatihan berkelanjutan. Pemerintah perlu merancang program pengembangan profesional guru yang mencakup pelatihan kewirausahaan pendidikan, manajemen digital, dan inovasi pembelajaran berbasis pasar. Dukungan dalam bentuk akses pendanaan mikro, insentif pajak, atau kemitraan publik-swasta juga dapat menjadi katalisator bagi tumbuhnya *edupreneurship*. Di tingkat lembaga pendidikan, kepala sekolah berperan penting sebagai fasilitator dan motivator dalam menciptakan iklim

kerja yang mendorong kreativitas ekonomi guru.

Lebih jauh, pembahasan literatur menunjukkan bahwa implementasi edupreneurship yang berhasil selalu melibatkan dimensi kolaboratif. Keberhasilan model *school-based enterprise* dan *community-based edupreneurship* di berbagai daerah membuktikan bahwa ketika guru diberdayakan melalui kolaborasi, mereka mampu menghasilkan inovasi ekonomi yang berkelanjutan. Edupreneurship tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga menumbuhkan karakter ekonomi kewarganegaraan bagi siswa, seperti tanggung jawab, kerja sama, dan etos produktif.

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa edupreneurship merupakan pendekatan strategis yang menggabungkan dimensi ekonomi, pendidikan, dan kewarganegaraan dalam satu kesatuan praksis. Ketika diimplementasikan secara sistematis dan berbasis nilai, edupreneurship dapat menjadi instrumen efektif untuk mencapai keadilan sosial-ekonomi di

kalangan guru serta memperkuat peran pendidikan sebagai kekuatan transformasi masyarakat.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa *edupreneurship* merupakan strategi potensial dan relevan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru di Indonesia, sekaligus memperkuat nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan dalam praktik pendidikan. Edupreneurship bukan sekadar aktivitas ekonomi tambahan, tetapi bentuk aktualisasi profesional guru dalam mengintegrasikan kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab sosial dalam proses pembelajaran.

Peluang pengembangan edupreneurship bagi guru sangat besar. Secara regulatif, kebijakan nasional seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, serta program Merdeka Belajar memberi ruang luas bagi inovasi ekonomi dalam pendidikan. Secara teknologi, era digital membuka akses bagi guru untuk berpartisipasi dalam ekonomi pengetahuan melalui berbagai

platform pembelajaran daring, marketplace edukatif, dan media sosial yang produktif. Selain itu, potensi sosial-budaya Indonesia yang berakar pada nilai gotong royong dan kekeluargaan menjadi modal sosial penting dalam membangun ekosistem edupreneurship yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi edupreneurship masih menghadapi tantangan multidimensional. Tantangan utama muncul dari rendahnya literasi kewirausahaan dan manajerial guru, keterbatasan dukungan kelembagaan, serta persepsi sosial yang masih memandang wirausaha sebagai hal yang bertentangan dengan idealisme profesi guru. Di sisi lain, struktur birokrasi pendidikan yang kaku sering kali menghambat lahirnya inovasi ekonomi di lingkungan sekolah.

Meski demikian, berbagai praktik baik menunjukkan bahwa edupreneurship dapat diimplementasikan secara efektif melalui model kolaboratif seperti *school-based enterprise* dan *community-based edupreneurship*.

Melalui pendekatan ini, guru tidak hanya memperoleh penghasilan tambahan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ekonomi kewarganegaraan kepada peserta didik—seperti tanggung jawab, etos kerja, dan kepedulian sosial.

Dengan demikian, *edupreneurship* dapat dipahami sebagai manifestasi nyata dari pendidikan kewarganegaraan ekonomi: mengajarkan kemandirian, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, dan menciptakan keadilan ekonomi berbasis pengetahuan. Konsep ini menjembatani dua kepentingan sekaligus, yaitu kesejahteraan individu guru dan kemajuan sosial masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- AFA, R.R., Badriyah, L. and ... (2025) "Implementasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Edupreneur," *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*. Vol 8(4).pp189-196
- Afifandasari, T. and Subiyantoro, S. (2022) "Pengembangan jiwa edupreneurship melalui

- kepemimpinan yang demokratis di lembaga pendidikan," *Jurnal Eduscience*.Vol 7(2).pp 183-190
- Anjelina, R. and Azzahra, F. (2025) "Tantangan dan peluang edupreneurship: kajian literatur di era digital," *Jurnal Ekonomi Bisnis*
- Arma, O.P. and Iswatiningsih, D. (2025) "ANALISIS PEMBELAJARAN BERBASIS KONSEP EDUPRENEURSHIP," *SIBATIK JOURNAL*.Vol 8(4).pp 73-81
- Farida, N. (2021) "Teacherpreneurship in the digital era: An opportunity for Indonesian teachers," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 6(2), pp. 112–124.
- Fitri, N.L. (2024) "Efektivitas APE: Antara Kepentingan Bisnis dan Tujuan Pendidikan," *Jurnal Latihan PPIAUD*
- Kasidi, D. (2023) "Peluang Edupreneurship Bagi Kesejahteraan Guru Di Indonesia," Tractare: *Jurnal Ekonomi-Manajemen*
- Kurniawati, A.B. et al. (2024) *Edupreneurship: Meningkatkan Jiwa Wirausaha Melalui Pendidikan*. books.google.com.
- Kusumawati, A. et al. (2025) *Transformasi Pendidikan Ekonomi: Literasi Keuangan, Kewirausahaan, dan Digitalisasi Berkelanjutan*. books.google.com.
- Lestariningsih, T., Mau, D.P. and ... (2025) "Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik: Melalui Keterampilan Kewirausahaan," *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN*.Vol 8(1).pp 183-190
- Mawardi, M.K. et al. (2025) "PENGEMBANGAN GURU BERBASIS EDUPRENEURSHIP GUNA PEMBENTUKAN KARAKTER WIRASAHAWAN SERTA KEMANDIRIAN SD NEGERI 1 ...," *J-ABDI*.Vol 6(2)
- Mugiarto, M. (2023) "Pembentukan Karakter Kewirausahaan Siswa SMK melalui Implementasi Manajemen Edupreneurship," *Jurnal Kridatama Sains Dan Teknologi*.Vol 8(1)
- Mukhammad Kholid Mawardi, O., Qadir Muslim, A. and Setyono, L. (2025) "PENGEMBANGAN GURU BERBASIS EDUPRENEURSHIP GUNA PEMBENTUKAN KARAKTER WIRASAHAWAN SERTA KEMANDIRIAN SD NEGERI 1 MULYOAGUNG KABUPATEN MALANG," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(10).
- Nurhadi, A. (2021) "Analisis kesejahteraan guru non-PNS di sekolah negeri," *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 9(1), pp. 55–64.
- Purwanto, S., Pratikto, H. and ... (2024) "PENGEMBANGAN APLIKASI EDUPRIME DALAM PROJEK KEWIRAUSAHAAN PADA PESERTA DIDIK DI SMP

- NEGERI 9 PROBOLINGGO,"  
*Research and Development Journal of Education.* Vol 11(2)
- Rahmah, S. (2022) "Edupreneurship dan inovasi guru dalam pembelajaran abad 21," *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 8(1), pp. 45–59.
- Robbani, I.R.I. (2024) *Manajemen Strategis Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Edupreneurship Di Sekolah Menengah Kejuruan Al-Faruqi Kampar.*
- Santoso, W.T., Yunianto, A. and ... (2024) "Implementasi Kepemimpinan Pendidikan Progresif Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran SMK Seni Pertunjukan di Era Revolusi Industri 4.0," *JIIP-Jurnal Ilmiah Pendidikan.* Vol 4(2).pp190-199
- Sembiring, V.B. (2025) "Membangun Masa Depan Pendidikan Berkelanjutan melalui Edupreneurship," *PROSIDING SEMINAR NASIONAL* Vol 3(1)
- Suyanto, S. (2021) *Profesionalisme dan kesejahteraan guru Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.
- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945* (no date).
- Wibowo, T. (2021) "Tantangan pengembangan edupreneurship di sekolah Indonesia," *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 13(2), pp. 87–96.
- Yosepty, R. et al. (2025) *Edupreneur dalam Pendidikan Manajemen Pagelaran: Teori dan Praktik.* books.google.com.